

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Ada empat undang-undang yang bisa dijadikan dasar pembentukan daerah otonom. Ke-empat undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. kemudian pemerintah mengatur lebih lanjut mengenai pemerintahan daerah dengan diberlakukannya Undang-undang baru yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan sebagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.¹

Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Kebijakan penggunaan tersebut di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dioptimalkan pengelolaannya adalah pemasukan dari pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Sedangkan Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan

¹ Republik Indonesia, “*Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*”, bab I, pasal 1, angka 47-49

merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Sumber-sumber pendapatan tersebut selanjutnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk dikelola dengan baik melalui pos-pos Belanja Daerah dalam APBD. Pengelolaan APBD yang baik, *prudent*, dan bertanggungjawab, diharapkan mampu menjadi alat yang ampuh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menekan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat². Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (Tambunan, 2015: 46). Pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dapat diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) *riil*. Sedangkan untuk tingkat daerah diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) *riil* (Rizal dalam Laranga,dkk., 2017:219). Menurut BPS, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,12% untuk tahun 2014-2016.

Para peneliti terdahulu telah melakukan penelitian dan kajian secara mendalam. Namun dari berbagai penelitian tersebut masih memberikan hasil yang variatif. Penelitian mengenai Belanja Daerah yang dilakukan oleh Bowo Laksono (2014:462) mengatakan secara partial menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mononimbar, dkk. (2017:48) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh

² Firda Nur Hanifa, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening”. (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Akuntansi STIE SBI, 2019), 4.

antara Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2018:68) Hasil penelitian menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernayani (2017:43) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

Mengenai pertumbuhan ekonomi yang mana juga terdapat perbedaan hasil penelitian. penelitian yang dilakukan oleh Watulingas, dkk. (2018:10) mengatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Retribusi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh W. Mononimbar, dkk. (2017:48) menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak (2006:51) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evita Syari (2019:71) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terdapatnya perbedaan hasil penelitian mengenai Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan melakukan pengujian secara empiris apakah terdapat pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan dimediasi oleh Belanja Daerah. Penelitian ini memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh W. Mononimbar, dkk. (2017:48) dengan judul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang ialah penelitian terdahulu menggunakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi serta menggunakan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai sampelnya. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan sampel pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variabel Intervening”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
2. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
3. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?

4. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
5. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendaptan Asli Daerah berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah Sebagai variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung?

1.3. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan objek penelitian penulis adalah

1. Untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian, penulis membatasi hanya LRA pada tahun 2014-2016.
2. Untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi objek penelitian, penulis membatasi hanya PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2014-2016.
3. Untuk Kabupaten/Kota yang menjadi objek penelitian, penulis membatasi hanya Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
2. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
3. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara simultan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

4. Untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara simultan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
5. Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai variabel intervening.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris dan memperkuat penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan sebagai informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis akan memuat uraian secara garis besar dari isi penelitian dalam tiap bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kajian pustaka, dan pengertian serta definisi yang menjadi dasar dalam penulisan, juga mengungkapkan kerangka pemikiran teoretis serta perumusan hipotesis.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisikan deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional dengan menggunakan variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta rancangan analisis data.

BAB IV DATA DAN ANALISIS DATA

Berisikan hasil dan pembahasan hasil penelitian tentang deskriptif statistik, variabel penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian kelima berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran atas penelitian yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang, Indonesia: UB press.
- Astuti, Y. T., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Islamic Social Reporting Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Indeks (JII) Periode Tahun 2013-2017. *Jurnal Optimal*, 17(1), 149-157.
- BPS. (2017). *Laporan Akhir Analisis Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2016*. Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id>.
- BPS. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2015*. Badan Pusat Statistik. <http://www.pbs.go.id>
- BPS. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2015*. Badan Pusat Statistik. <http://www.pbs.go.id>
- Binawati, E., & Susliyanti, E. D. (2020). Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis AkruaL Dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Optimal*, 17(2), 20-37.
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Optimal*, 19(1), 19-39.
- Binawati, E. (2015). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dan Akuntabilitas Sektor Publik Studi pada Pemerintah DIY. *Wahana*, 18(1), 1-19.
- Edgar Rangka Zainudin. (2013). *Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta: Danadyaksa Publisher.
- Fusanto, Andri. (2018). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- General Knowledge. (2015). Peraturan Daerah. [internet]. (<http://artong.blogspot.co.id/2015/01/peraturan-daerahperda.html>. 11 maret 2020, 14 : 22)
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hadi, Syamsul. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*. Penerbit EKONISIA. Yogyakarta.

- Hanifa, Firda Nur. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. STIE Solusi Bisnis Indonesia. Yogyakarta.
- Hartono, Jogiyanto.(2004). *Metodologi Penelitian Bisnis* edisi 6. Bulak Sumur dan Kaliurang: BPFE-Yogyakarta.
- Laksono, Bagus Bowo. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang*. ISSN 2252-6765. Vol. 3 No. 4.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: C.V Andi Offset.
- Mononimbar, Raggie W. Dkk. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 17 No. 2.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 28. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 23. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 33. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Purwanto, Suharyadi. (2016). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Ramadhan, R., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode Mix Method (Pada Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Yogyakarta). *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1).
- Resmi Siti. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10*. Yogyakarta: Salemba 4.
- Sarwono dan Herlina. (2012). *Statistik Terapan Aplikasi untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Simanjuntak, Daslan. (2006). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Labuhan Batu. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.

- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.
- Sugiyono. (2005). *Statistika untuk Penelitian*. Penerbit CV ALFABETA. Bandung
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Penerbit ALFABETA. Bandung
- Syari, Meilya Evita. (2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Deli Serdang dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Uhise, Stepvani. (2013). Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174. Vol 1 No.4 Desember 2013: 1677-1686.
- Wikipedia. *Daftar Kabupaten dan Kota di Lampung*. [online].
(http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Lampung/. 11 maret 2020, 10 : 17 WIB)